



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 700/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

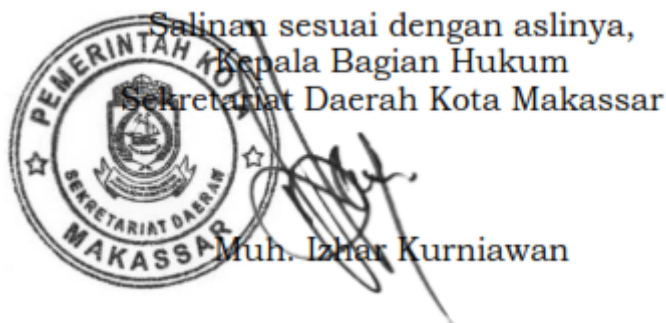
- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul atau instansi terkait langsung secara substansi mengagendakan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan melakukan koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 Februari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar masing-masing di Tempat;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah masing-masing di Makassar;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 700/188.4.45/Tahun 2025
 TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026		Baru			Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar	2025	
2.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025			Ubah		Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar	2025	
3.	Penetapan Rencana Strategis							

	Perangkat Daerah Tahun 2025-2029							
4.	Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kota Makassar Tahun 2025-2029							
5.	Rencana aksi daerah sustainable development goals (SDGs) / tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Makassar Tahun 2025-2029							
6.	Rencana aksi disabilitas Kota Makassar Tahun 2025-2029							
7.	Grand Desain Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan Stunting Kota makassar							
8.	Rencana aksi daerah percepatan							

	penanganan anak tidak sekolah 2025-2029							
9.	Pemberian Penghargaan kepada masyarakat							
10.	Pecepatan penanganan stunting Kota Makassar tahun 2025							
11.	Pedoman Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
12.								
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran OPendapatan dan		Baru				2025	

	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025							
2.	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027						2025	
3.	Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2027						2025	
4.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025						2025	
5.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar							

	Tahun Anggaran 2025							
6.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026							
7.	Pembayaran Gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.							2025	
2.							2025	
3.							2025	

4.							2025	
5.							2025	
6.							2025	
7.							2025	
8.							2025	
9.							2025	
10.							2025	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah			Ubah			2025	
2.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun							

	2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Makassar							
3.	Pencabutan Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara Sebagai Laskar Pelayanan Publik Berintegritas Pada Lingkup Pemerintah Daerah							
4.	Manajemen Aparatur Sipil Negara							
5.	Sistem Merit pada Pemerintah Kota Makassar							

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Penerapan Inovasi Daerah Kota Makassar		Baru				2025	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.							2025	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR								
1.	Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama		Baru				2025	
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR								
1.	Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar		Baru				2025	

	sebagai Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR								
1.	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar		Baru				2025	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
2.							2025	
3.							2025	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR								
1.	Penetapan Tarif Retribusi Kebersihan		Baru				2025	
2.								
3.								
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR								
1.	Penataan Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Bangsa Kencana dan Sub Instansi Masyarakat Perkotaan bangsa Kencana		Baru				2025	

1.			Baru				2025	
DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Peta Jalanan Pengendalian Inflasi Tahun 2025- 2028 Wali Kota Makassar		Baru				2025	
2.	Pedoman pengadaan barang dan jasa lingkup Perumda Pasar Makassar Raya							
3.	Pedoman pelaksanaan							

	kerjasama lingkup Perumda Pasar Makassar Raya dengan pihak lainnya (Pemerintah, BUMN,BUMD dan Pihak Swasta)							
4.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro							
5.								
BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								

1.	Pakaian dinas sipil aparaturnegara		Baru				2025	
2.								
3.								
4.								
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.			Baru				2025	
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Panakuk kang dan Kelurahan se-kecamatan Panakuk kang Kota Makassar		Baru				2025	
2.	Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Manggala dan Kelurahan se-							

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA								
1.	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Daya		Baru				2025	
2.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Daya		Baru				2025	



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MCH. RAMDHAN POMANTO